

KEBEBASAN DAN TANGGUNG JAWAB MUATAN PESAN

Kartini¹, Alya Dwi Kinanti², Aqila Zahra Harahap³, Khairi Tariq Sitorus⁴

^{1,2,3,4}Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: kartinisikumbang86@gmail.com¹, kinantialyadwi344@gmail.com²,
aqilazahrahrp@gmail.com³, khairitariq17@gmail.com⁴

Abstrak: Kebebasan berkomunikasi dan tanggung jawab dalam muatan pesan merupakan dua hal yang saling terkait dalam era digital saat ini. Kebebasan berbicara memungkinkan individu untuk menyampaikan ide dan pendapat, tetapi tanggung jawab memastikan bahwa informasi tersebut tidak merugikan orang lain. Penelitian ini bertujuan untuk menggali pemahaman masyarakat tentang kebebasan berkomunikasi dan tanggung jawab yang harus diemban. Metode yang digunakan adalah analisis konten media sosial dan observasi interaksi di platform digital. Hasilnya menunjukkan bahwa masyarakat menghargai kebebasan berkomunikasi namun juga menyadari pentingnya tanggung jawab dalam berbagi informasi. Ada keinginan untuk mengurangi penyebaran berita palsu dan ujaran kebencian, serta harapan agar semua pihak memperhatikan etika komunikasi. Dengan demikian, penelitian ini menekankan perlunya keseimbangan antara kebebasan dan tanggung jawab dalam penyampaian pesan di dunia digital.

Kata Kunci: Kebebasan, Tanggung Jawab, Muatan Pesan.

Abstract: Freedom of communication and responsibility in message content are two things that are interrelated in today's digital era. Freedom of speech allows individuals to convey ideas and opinions, but responsibility ensures that the information does not harm others. This study aims to explore the public's understanding of freedom of communication and the responsibilities that must be borne. The methods used are social media content analysis and observation of interactions on digital platforms. The results show that people value freedom of communication but also realize the importance of responsibility in sharing information. There is a desire to reduce the spread of fake news and hate speech, as well as the hope that all parties will pay attention to communication ethics. Thus, this study emphasizes the need for a balance between freedom and responsibility in delivering messages in the digital world.

Keywords: Freedom, Responsibility, Message Content.

PENDAHULUAN

Teknologi merupakan upaya manusia untuk mengatasi tantangan yang muncul ketika berinteraksi dengan alam, menjadikannya lebih imanen. Dengan menggunakan akal budi, pengalaman, dan pengamatan terhadap lingkungan sekitar, manusia mengembangkan alat serta kemampuan untuk beradaptasi dengan kekuatan dan hukum alam yang pada awalnya tampak

tak tertandingi (Aziz, 2021). Namun, dengan penemuan roda, yang memungkinkan benda untuk menggelinding, pemindahan barang berat menjadi jauh lebih mudah. Singkatnya, teknologi memberikan kenyamanan dan kemudahan dalam hidup manusia.

Dalam berkomunikasi, salah satu tantangan utama adalah keterbatasan ruang dan waktu. Secara alami, kemampuan manusia untuk berkomunikasi sangat terbatas, baik dalam jarak maupun waktu. Jarak komunikasi manusia terbatas pada sejauh indera kita mampu menangkap suara dan penglihatan. Tanpa bantuan teknologi, komunikasi hanya terjadi dalam jangkauan inderawi. Begitu pula dalam hal waktu, manusia tidak dapat menyampaikan pesan kepada orang-orang dari dimensi waktu yang berbeda, baik masa lalu maupun masa depan. Namun, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah segala hal ini. Sekarang, ruang dan waktu menjadi relatif, dan jarak tidak lagi menjadi penghalang (Fabriar 2014).

Persoalan ruang dan waktu dalam komunikasi, menurut beberapa tokoh awal di bidang teknologi komunikasi, menciptakan bias yang melekat pada setiap bentuk media komunikasi. Beberapa media memiliki karakteristik yang mengikat pada ruang, sementara yang lain terikat pada waktu (Kaligis 2018). Media yang mengikat ruang bersifat statis, seperti menhir atau tulisan di dinding gua, di mana manusia harus mendatangi media untuk memahami pesannya. Kelebihannya, media ini dapat bertahan selama ribuan tahun. Media yang terikat pada waktu, meskipun lebih mobile dan tersebar luas, seperti koran, sering kali memiliki nilai yang cepat pudar.

Ketika masyarakat masih sederhana, individu memenuhi kebutuhan mereka sendiri sebagai petani, pengrajin, pendidik, dan seniman. Pada masa itu, informasi diperoleh dengan cara mencari di tempat umum. Namun, seiring dengan perkembangan masyarakat, mulai terjadi pelembagaan fungsi-fungsi tertentu (Sihombing 2020). Pekerjaan menjadi lebih terspesialisasi, di mana ada pembagian kerja yang menciptakan sistem ekonomi berupa pertukaran barang dan jasa. Masyarakat mulai mengenal konsep privat dan publik, yang secara politik memengaruhi struktur masyarakat.

Perkembangan pelembagaan informasi mengikuti tahap kemajuan masyarakat, beriringan dengan pranata sosial dan teknologi. Dengan semakin kompleksnya tatanan sosial, pembagian kerja pun menjadi semakin jelas, termasuk nilai-nilai dan etika yang mengatur kehidupan bersama. Namun, perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan sering kali melampaui kematangan lembaga sosial yang ada, menyebabkan masyarakat sering kali

terjebak dalam perdebatan mengenai konsekuensi dari kemajuan teknologi.

Internet sebagai salah satu produk teknologi yang lahir pada tahun 1962 dengan tujuan memastikan kesinambungan komunikasi di tengah potensi perang nuklir. Meskipun perang nuklir tidak terjadi, internet telah berkembang dengan pesat, mengubah cara manusia berinteraksi dan berkomunikasi (Putu et al. 2022). Kehadiran internet menawarkan inovasi dan konsekuensi baru bagi kehidupan sosial, membuka cakrawala pikiran, serta memicu transformasi lembaga-lembaga sosial yang sudah mapan. Namun, kehadiran internet juga menimbulkan pertanyaan serius mengenai kebebasan informasi, akurasi, dan kredibilitas informasi yang disajikan.

Diskusi mengenai internet seringkali terbagi antara dua sudut pandang ekstrem. Satu pihak melihat internet sebagai berkah yang meningkatkan kebebasan, bisnis, dan kesalingterhubungan, sementara pihak lain mengkhawatirkan dampak negatifnya terhadap struktur sosial, moralitas, dan hubungan antarmanusia. Di antara kedua pandangan ini, terdapat mereka yang bersikap bimbang, mengakui manfaat sekaligus waspada terhadap ancaman yang ada.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk memahami pandangan masyarakat tentang kebebasan berkomunikasi dan tanggung jawab yang menyertainya. Pendekatan ini dapat mencakup analisis konten dari media sosial, artikel, dan materi komunikasi lainnya untuk mengidentifikasi tema dan isu yang muncul terkait kebebasan berekspresi. Observasi terhadap interaksi di platform digital juga dapat membantu mengamati bagaimana individu dan kelompok mengekspresikan diri serta bagaimana tanggung jawab sosial diimplementasikan dalam praktik sehari-hari.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hakikat Kebebasan Dalam Muatan Pesan

Kebebasan dalam muatan pesan telah mengalami evolusi makna seiring perkembangan zaman. Era digital membawa transformasi besar dalam cara manusia berkomunikasi dan menyampaikan pesan. Ruang ekspresi yang semakin luas membuka peluang bagi setiap individu untuk menyuarakan pemikiran dan gagasannya tanpa batasan geografis maupun temporal. Kebebasan muatan pesan mengandung arti yang jauh lebih dari sekadar kemampuan

untuk berbicara atau menulis. Kebebasan ini mencakup hak untuk memilih platform, menentukan gaya penyampaian, dan memutuskan waktu serta cara penyebaran informasi (Muhmidayeli 2017). Setiap individu memiliki otonomi untuk mengekspresikan diri melalui berbagai bentuk media, mulai dari teks, gambar, audio, hingga konten multimedia yang interaktif.

Hakikat kebebasan dalam muatan pesan adalah prinsip yang menekankan kebebasan setiap individu untuk menyampaikan informasi, pandangan, dan ekspresi tanpa hambatan yang tidak sah. Secara historis, konsep ini memiliki akar dalam perkembangan filsafat dan ideologi politik, khususnya di era Pencerahan (Rusli 2005). Tokoh-tokoh seperti Voltaire, John Stuart Mill, dan Thomas Jefferson melihat kebebasan berekspresi sebagai hak fundamental untuk menjaga keberagaman gagasan dan inovasi dalam masyarakat yang sehat.

Dalam dunia digital, kebebasan ini semakin meluas. Teknologi memungkinkan pesan melintasi batas geografis dengan cepat, menjadikan ruang digital sebagai wadah terbuka bagi berbagai pandangan dari seluruh dunia. Kebebasan berekspresi di ruang digital memiliki peran penting dalam memperjuangkan hak-hak minoritas, meningkatkan kesadaran tentang isu-isu sosial, serta mendukung kebebasan pers dan pelaporan independen. Namun kebebasan ini juga dihadapkan pada tantangan baru, terutama dalam hal konten negatif, seperti ujaran kebencian, berita bohong, dan penyebaran radikalisme. Di beberapa negara, kebebasan ini juga menjadi dilema, karena sering kali bertentangan dengan norma dan nilai budaya setempat. Contoh kasus di Tiongkok atau Korea Utara, di mana kebebasan berekspresi secara ketat diatur oleh negara untuk mempertahankan stabilitas nasional, menunjukkan bahwa kebebasan berekspresi seringkali dibatasi sesuai dengan kepentingan pemerintah yang berkuasa (Julianja 2022).

Di negara-negara demokratis seperti Amerika Serikat, kebebasan berekspresi menjadi dasar konstitusional yang tidak bisa diintervensi. Hal ini terlihat dari perlindungan yang diberikan oleh Amandemen Pertama Konstitusi Amerika, yang mengutamakan kebebasan individu di atas kontrol negara. Dengan demikian, perbedaan budaya, sejarah, dan sistem politik menghasilkan pendekatan yang bervariasi dalam pemaknaan kebebasan berekspresi, khususnya dalam muatan pesan di ruang digital.

Ruang digital telah menciptakan demokratisasi informasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Media sosial, blog, dan platform berbagi konten lainnya memberikan kesempatan yang sama bagi setiap orang untuk menjadi produsen sekaligus konsumen informasi.

Fenomena ini menghadirkan dinamika baru dalam lanskap komunikasi global, dimana hierarki tradisional dalam penyebaran informasi mulai memudar.

Di era digital, kebebasan dalam muatan pesan termanifestasi dalam berbagai bentuk yang semakin beragam. Masyarakat tidak lagi terbatas pada media konvensional untuk menyampaikan aspirasi dan gagasannya. Platform media sosial telah menjadi ruang publik virtual yang memungkinkan terjadinya dialog dan pertukaran ide secara real-time. Fenomena citizen journalism misalnya, menunjukkan bagaimana kebebasan dalam muatan pesan telah mengubah paradigma jurnalisme tradisional (Nurlatifah 2020). Masyarakat biasa kini bisa melaporkan peristiwa atau berbagi informasi langsung dari lokasi kejadian, tanpa harus menunggu liputan media mainstream. Hal ini menciptakan demokratisasi informasi yang lebih luas dan mendorong terciptanya narasi yang lebih beragam dalam ruang publik.

Kebebasan dalam muatan pesan juga membawa perubahan dalam pola interaksi sosial masyarakat. Media sosial telah menciptakan ruang dimana orang-orang dengan minat dan pandangan serupa dapat membentuk komunitas virtual. Kelompok-kelompok ini kemudian menjadi wadah untuk berbagi pengalaman, mendiskusikan isu-isu tertentu, atau bahkan mengorganisir gerakan sosial. Namun, fenomena echo chamber dan filter bubble juga muncul sebagai konsekuensi dari kebebasan ini. Algoritma platform digital yang cenderung menampilkan konten sesuai preferensi pengguna dapat menciptakan gelembung informasi yang membatasi eksposur terhadap pandangan yang berbeda. Hal ini berpotensi menimbulkan polarisasi dan memperdalam kesenjangan pemahaman antar kelompok masyarakat.

Implikasi Terhadap Perkembangan Demokrasi

Kebebasan dalam penyampaian pesan menjadi pilar utama bagi perkembangan sistem demokrasi modern. Ruang digital telah menghadirkan arena baru bagi partisipasi publik dalam proses politik dan pengambilan keputusan. Masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi tentang kebijakan pemerintah, menyuarakan kritik, atau memberikan dukungan terhadap isu-isu tertentu melalui berbagai platform digital. Media sosial khususnya telah mengubah dinamika komunikasi politik secara fundamental. Para pemimpin politik kini dituntut untuk lebih terbuka dan responsif terhadap aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui kanal-kanal digital. Interaksi langsung antara politisi dan konstituennya menciptakan bentuk akuntabilitas baru dalam sistem demokrasi (Irhamdi 2018).

Era digital juga membawa perubahan dalam budaya komunikasi masyarakat. Bahasa dan

gaya komunikasi mengalami evolusi untuk menyesuaikan dengan karakteristik platform digital. Emoticon, meme, dan berbagai bentuk ekspresi digital lainnya muncul sebagai cara baru dalam menyampaikan pesan dan emosi. Kecepatan dan spontanitas menjadi ciri khas komunikasi di era digital. Pesan-pesan singkat dan visual lebih diminati dibandingkan tulisan panjang. Fenomena ini mendorong munculnya format-format konten baru yang lebih ringkas dan mudah dicerna, seperti tweet, story, atau video pendek.

Dimensi Tanggung Jawab Komunikasi Digital

Seiring berkembangnya kebebasan berekspresi, tanggung jawab komunikasi digital menjadi elemen penting dalam menjaga ekosistem digital yang sehat. Tanggung jawab ini melibatkan semua pihak yang terlibat dalam penyebaran informasi, termasuk pembuat konten, audiens, platform media sosial, dan pemerintah. Pada tingkat pribadi, setiap individu diharapkan bertanggung jawab untuk menyampaikan informasi yang benar dan tidak memanipulasi audiens untuk keuntungan pribadi atau kelompok tertentu.

Tanggung jawab ini dapat dikategorikan menjadi tiga aspek utama: tanggung jawab moral, sosial, dan hukum. Secara moral, individu seharusnya menghindari penyebaran konten yang dapat menimbulkan perpecahan, ketakutan, atau kebingungan. Tanggung jawab sosial, pada gilirannya, mencakup kewajiban untuk mempertimbangkan dampak sosial dari setiap pesan yang dibagikan di ruang publik. Hal ini mengacu pada pentingnya menjaga harmoni sosial, terutama di tengah keberagaman audiens yang memiliki latar belakang berbeda.

Tanggung jawab hukum melibatkan kepatuhan terhadap undang-undang dan regulasi yang mengatur etika komunikasi. Banyak negara memiliki peraturan yang melarang penyebaran ujaran kebencian, konten pornografi, atau materi-materi yang dianggap merusak ketertiban umum. Contoh nyata dalam penerapan tanggung jawab ini adalah peran platform media sosial dalam mengontrol penyebaran hoaks selama pandemi COVID-19, di mana platform seperti Facebook dan Twitter menerapkan kebijakan verifikasi fakta untuk mengurangi penyebaran informasi yang tidak akurat.

Batas dan Regulasi Muatan Pesan

Kebebasan berekspresi tidak berarti kebebasan tanpa batas. Batasan dan regulasi terhadap muatan pesan sangat diperlukan untuk menjaga ketertiban sosial dan mencegah dampak negatif yang mungkin ditimbulkan oleh kebebasan berekspresi yang tidak terkendali.

Undang-undang tentang ujaran kebencian, perlindungan data pribadi, dan regulasi konten adalah beberapa contoh regulasi yang diterapkan di berbagai negara untuk mengontrol isi pesan yang beredar di ruang publik, terutama di ranah digital.

Batasan yang diterapkan ini mencakup regulasi terhadap konten yang berpotensi memicu konflik atau merusak moral publik. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menjadi dasar hukum untuk mengatur konten digital, termasuk larangan terhadap hoaks, fitnah, serta penyebaran informasi yang menyesatkan (Mufid n.d.). Regulasi ini mencerminkan kebutuhan akan aturan yang jelas untuk mencegah penyalahgunaan kebebasan berekspresi di ruang digital. Kebijakan ini sering kali mencakup algoritma yang mendeteksi ujaran kebencian atau konten yang tidak pantas. Namun, tantangan utama dari regulasi ini adalah memastikan bahwa batasan yang diterapkan tidak menghalangi kebebasan berekspresi secara berlebihan, tetapi tetap melindungi hak publik untuk mendapatkan informasi yang akurat.

Dampak Sosial dan Psikologis Kebebasan Komunikasi

Kebebasan komunikasi memiliki dampak terhadap psikologi individu dan dinamika sosial masyarakat. Secara sosial, kebebasan ini memungkinkan keterbukaan dalam menyampaikan pendapat, yang pada gilirannya mendorong terjadinya diskusi yang lebih beragam dan inklusif di ruang publik. Namun, kebebasan komunikasi yang tidak terkendali juga dapat mengarah pada polarisasi pendapat, khususnya dalam isu-isu sensitif seperti politik, agama, dan etnisitas. Efek samping ini terlihat dalam peningkatan ketegangan sosial dan konflik antar kelompok di ruang digital.

Dampak psikologis kebebasan komunikasi sering kali lebih kompleks dan tidak terlihat langsung. Paparan konten negatif, seperti ujaran kebencian atau konten kekerasan, dapat mempengaruhi kondisi mental individu, menyebabkan stres, kecemasan, atau bahkan depresi. Terutama bagi kelompok rentan seperti remaja, kebebasan komunikasi digital dapat menimbulkan dampak psikologis yang merugikan, terutama jika mereka tidak memiliki kontrol diri yang cukup terhadap konten yang mereka konsumsi.

Salah satu contoh nyata dari dampak sosial dan psikologis kebebasan komunikasi adalah fenomena "*cancel culture*". Fenomena ini menggambarkan bagaimana individu atau kelompok yang dinilai melanggar norma sosial dapat di jauhi atau dikritik habis-habisan di media sosial. Meskipun bertujuan untuk menegakkan keadilan sosial, *cancel culture* sering kali berdampak negatif pada kesehatan mental individu yang terlibat, serta menimbulkan efek domino yang

merusak reputasi seseorang atau kelompok tanpa adanya proses yang adil (Karthubij 2011).

Etika dan Norma dalam Penyampaian Pesan

Etika dan norma dalam penyampaian pesan merupakan dua komponen kunci yang membentuk fondasi komunikasi yang bertanggung jawab dan efektif di dunia digital. Dalam era di mana informasi dapat disebarkan dengan sangat cepat melalui berbagai platform, penting bagi setiap individu untuk memahami dan menerapkan prinsip-prinsip etika dalam berkomunikasi. Etika berfungsi sebagai panduan moral yang menekankan pentingnya kejujuran, integritas, dan penghormatan terhadap hak orang lain, sedangkan norma adalah aturan atau standar sosial yang diharapkan untuk diikuti dalam interaksi sehari-hari.

Penyebaran berita bohong atau informasi yang tidak terverifikasi dapat memiliki dampak, baik secara sosial maupun psikologis. Misalnya, berita palsu tentang suatu kejadian dapat memicu kepanikan di masyarakat, merusak reputasi individu, atau bahkan mempengaruhi keputusan politik. Oleh karena itu, penting bagi setiap individu untuk melakukan verifikasi informasi sebelum membagikannya. Kejujuran dalam komunikasi tidak hanya menciptakan kepercayaan antara pengirim dan penerima pesan, tetapi juga menjaga kredibilitas platform komunikasi itu sendiri (Kaligis 2018).

Norma sosial dalam komunikasi digital mencakup batasan-batasan yang mengatur perilaku yang dianggap dapat diterima atau tidak. Hal ini termasuk norma kesopanan, di mana pengguna diharapkan untuk berinteraksi dengan saling menghormati dan menghindari penggunaan bahasa yang kasar atau menghina. Dalam diskusi daring, norma ini menjadi semakin penting karena sering kali komunikasi tertulis tidak menyampaikan nada atau secara jelas, yang dapat menyebabkan salah paham. Etika dan norma berfungsi sebagai pengingat bahwa meskipun kita berkomunikasi secara digital, kita tetap harus mematuhi prinsip-prinsip kesopanan dan penghormatan yang berlaku di dunia nyata.

Privasi merupakan aspek penting lain dalam etika komunikasi digital. Di dunia maya, pengguna sering kali berbagi informasi pribadi tanpa menyadari risiko yang mungkin muncul. Menghormati privasi orang lain, seperti tidak membagikan informasi pribadi tanpa izin, adalah prinsip etika yang fundamental. Pelanggaran privasi dapat mengakibatkan konsekuensi serius, termasuk pencurian identitas, perundungan daring, atau bahkan tindakan kriminal. Oleh karena itu, individu perlu menyadari pentingnya menjaga privasi, baik untuk diri mereka sendiri maupun orang lain.

Dalam masyarakat yang semakin global, komunikasi sering kali melibatkan individu dari latar belakang budaya, agama, dan ideologi yang beragam. Menghargai perbedaan ini merupakan bagian dari etika komunikasi yang tidak dapat diabaikan. Diskusi yang melibatkan beragam sudut pandang dapat menjadi konstruktif jika dilakukan dengan saling menghormati. Ini mencakup penggunaan bahasa yang inklusif dan menghindari stereotip atau generalisasi yang dapat menyinggung kelompok tertentu (Muhmidayeli 2017). Dengan berkomunikasi secara inklusif, kita tidak hanya menghargai identitas orang lain, tetapi juga menciptakan lingkungan yang aman bagi semua individu untuk mengekspresikan pandangan mereka.

Banyak platform digital saat ini mengimplementasikan kebijakan etika untuk mendorong perilaku komunikasi yang baik. Misalnya, Facebook dan Twitter memiliki kebijakan yang melarang ujaran kebencian dan penyebaran informasi yang menyesatkan. Kebijakan ini dirancang untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi seluruh pengguna. Namun, penegakan kebijakan ini sering kali menghadapi tantangan, seperti menentukan batasan antara kebebasan berekspresi dan konten yang merugikan. Di sinilah etika komunikasi menjadi sangat penting, karena membantu pengguna untuk memahami tanggung jawab mereka dalam menggunakan platform tersebut.

Meskipun kebijakan etika dari platform dapat membantu mengatur perilaku pengguna, penting untuk diingat bahwa tanggung jawab tidak hanya terletak pada penyedia layanan. Setiap individu juga memiliki peran dalam menciptakan ruang komunikasi yang sehat. Hal ini mencakup kesadaran untuk tidak terlibat dalam perundungan daring, tidak membagikan konten yang merugikan, dan melaporkan konten yang melanggar aturan. Ketika pengguna bertindak sebagai pengawas dalam komunitas digital mereka, mereka berkontribusi pada terciptanya budaya komunikasi yang lebih baik dan lebih bertanggung jawab.

Dengan meningkatnya penggunaan teknologi dan media sosial, semakin sulit untuk mengontrol dan mengawasi konten yang beredar. Fenomena seperti trolling, penyebaran berita palsu, dan ujaran kebencian menunjukkan betapa kompleksnya masalah etika di dunia digital. Sering kali, individu merasa terlindungi oleh anonimitas yang ditawarkan oleh internet, yang dapat menyebabkan perilaku yang tidak etis. Oleh karena itu, penting bagi pengguna untuk tetap waspada dan menyadari dampak dari tindakan mereka.

Ujaran kebencian dan perundungan daring dapat menyebabkan masalah kesehatan mental bagi korban, termasuk depresi dan kecemasan. Ketika individu merasa tidak aman atau

terancam dalam lingkungan digital, mereka cenderung menarik diri dan menghindari interaksi, yang pada gilirannya mengurangi partisipasi mereka dalam masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa etika dan norma dalam penyampaian pesan bukan hanya tentang kepatuhan terhadap aturan, tetapi juga tentang menciptakan komunitas yang mendukung dan inklusif.

KESIMPULAN

Kebebasan berkomunikasi telah menjadi fondasi bagi perkembangan demokrasi modern, di mana individu dapat dengan mudah menyampaikan pendapat dan ide melalui berbagai platform. Namun, kebebasan ini tidak lepas dari tantangan, terutama dalam konteks penyebaran informasi yang tidak akurat dan dampak negatif dari ujaran kebencian. Setiap individu memiliki tanggung jawab untuk menjaga integritas komunikasi, tidak hanya untuk melindungi diri sendiri, tetapi juga untuk menciptakan lingkungan digital yang positif. Tanggung jawab ini mencakup keharusan untuk memverifikasi informasi sebelum disebarluaskan serta menghormati privasi dan hak orang lain. Batasan dan regulasi diperlukan untuk melindungi masyarakat dari konten yang berpotensi merugikan, tanpa mengorbankan kebebasan berekspresi. Kebebasan dan tanggung jawab dalam muatan pesan adalah dua sisi dari koin yang sama, saling melengkapi dan mendukung.

DAFTAR PUSTAKA

- Aziz, Nurul Asriani Muh., Fatimah Fatimah, and Andi Ahriani. 2021. "Kebebasan Pers Ditinjau Dari Kode Etik Jurnalistik: Analisis Isi Pemberitaan Politik Pada Media Cetak Radar Sorong." *Al-Hikmah: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi* 1(1):28–51. doi: 10.47945/al-hikmah.v1i1.476.
- Fabiar, Silvia Riskha. 2014. "Etika Media Massa Era Global." *An-Nida : Jurnal Komunikasi Islam* 6(1):70–85.
- Frete, Madrid De, and Retor A. .. Kaligis. 2018. "Implementasi Teori Pers Tanggung Jawab Sosial Dalam Pemberitaan Tvri Pusat." *CoverAge: Journal of Strategic Communication* 9(1):26–34.
- Irhamdi, Muhammad. 2018. "Menghadirkan Etika Komunikasi Dimedia Sosial (Facebook)." *Komunike* 10(2):139–52. doi: 10.20414/jurkom.v10i2.676.
- Julianja, Sufiana. 2022. "Pembatasan Kebebasan Berkespresi Dalam Bermedia Sosial : Evaluasi Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dalam Perspektif Hak

- Asasi Manusia.” *Padjajaran Law Review* 10(1):1–13.
- Karthubij, Susanto. 2011. “Tentang Kebebasan Dan Tanggungjawab Informasi Di Internet: Beberapa Catatan.” 4(1):1–8.
- Mufid, Muhamad. n.d. “ETIKA DAN FILSAFAT KOMUNIKASI.”
- Muhmidayeli, Muhmidayeli. 2017. “KEBEBASAN DAN TANGGUNGJAWAB MORAL: Analisis Filosofis Pencarian Pembetulan Nilai Moral Dalam Kaitannya Dengan Normativitas Agama.” *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman* 7(2):240. doi: 10.24014/af.v7i2.3792.
- Nurlatifah, Mufti. 2020. “Persimpangan Kebebasan Bereksresi Dan Tanggung Jawab Sosial Pada Regulasi Jurnalisme Digital Di Indonesia.” *Journal IPTEK-KOM (Jurnal Pengetahuan Dan Teknologi Komunikasi* 22(1):77–93.
- Putu, Ni, Ega Maha Wiryanthi, Efrida Ratnawati Gultom, Ni Putu Ega, and Maha Wiryanthi. 2022. “Tanggung Jawab Perusahaan Pers Terhadap Jurnalisnya Atas Kebebasan Pers Di Indonesia.” *Unes Law Review* 5(2):452–61.
- Rusli. 2005. “Kebebasan Berkomunikasi Dalam Perspektif Islam.” 1–19.
- Sihombing, Theresia Romaito. 2020. “KEBEBASAN DAN TANGGUNG JAWAB PERS DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS.” 2507(February):1–9.